

# **PENERAPAN OUTCOME-BASED EDUCATION (OBE) DAN PERMASALAHANNYA**

**Yakin Bakhtiar Siregar**

## **A. Pendahuluan**

Perjalanan pendidikan di Indonesia tidak luput dari pengaruh perubahan zaman yang menyebabkan terjadinya pergeseran tujuan pendidikan nasional. Globalisasi yang melanda seluruh dunia di abad ke 21 menyebabkan tujuan pendidikan nasional tidak lagi hanya untuk mencerdaskan bangsa dan memerdekakan manusia namun bergeser mengarah kepada pendidikan sebagai komoditas karena lebih menekankan penguasaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Seni (IPTEKS) yang bersifat pragmatis dan materialis. Hal ini tentu menjadi perhatian kita semua mengingat tujuan Pendidikan Nasional yang tercantum dalam UU No 20 Tahun 2003, Pasal 3, tidak hanya berorientasi terhadap pragmatism dan materialisme namun memiliki tujuan yang utuh untuk membentuk manusia yang memiliki iman dan taqwa (IMTAQ) serta menguasai IPTEKS. Pergeseran tujuan pendidikan nasional tersebut semakin terasa saat ini dengan terjadinya krisis karakter di bidang pendidikan, karena pragmatism dalam merespon kebutuhan pasar kerja lebih menekankan kepada hal-hal yang bersifat materialisme sehingga melupakan pengajaran dengan semangat kebangsaan, keadilan sosial, serta sifat-sifat kemanusiaan yang memiliki moral luhur sebagai warga negara.

## **B. Pergeseran Pendidikan Akibat Revolusi Industri 4.0**

Di Era Revolusi Industri 4.0 dan badai pandemi Covid1-19 memaksa Perguruan Tinggi mempersiapkan dan merubah langkah-langkah strategis dalam mengantisipasi perubahan dunia yang kini telah dikuasai perangkat digital. Ada banyak langkah strategis yang harus dirumuskan dalam berbagai aspek mulai dari kelembagaan, bidang studi, kurikulum, sumber daya, serta pengembangan cyber university, risbang hingga inovasi.

Saat ini bagi suatu perguruan tinggi dalam mencapai kesuksesan pada kuantitas saja tidak lagi menjadi indikator utama, akan tetapi adalah kualitas lulusannya. Tuntutan dan tantangan sebuah negara dalam menghadapi mencapai kesuksesan di revolusi industri 4.0 erat kaitannya dengan inovasi yang diciptakan oleh sumber daya yang berkualitas, sehingga Perguruan Tinggi wajib dapat menjawab tantangan untuk menghadapi kemajuan teknologi dan persaingan dunia kerja di era globalisasi.

Tentunya untuk melahirkan sumber daya yang inovatif dan adaptif terhadap teknologi, diperlukan penyesuaian kurikulum, sarana dan prasarana pendidikan dan pembelajaran dalam hal teknologi informasi, internet, analisis big data dan komputerisasi. Maka Perguruan tinggi wajib menyediakan infrastruktur pembelajaran tersebut diharapkan mampu menghasilkan lulusan yang terampil dalam aspek literasi data, literasi teknologi dan literasi manusia.

Selanjutnya kualitas lulusan perguruan tinggi saat ini berdaya dan responsif serta memiliki jiwa *entrepreneur*. Tentu ini menjadi tantangan menarik bagi perguruan tinggi untuk menjawabnya, penguatan indikator perguruan tinggi pada kualitas dan bukan hanya kuantitas. Saat ini dalam pengembangannya, PT dalam penguatan tujuannya harus didasarkan untuk meningkatkan kualitas dan menjawab kebutuhan dunia kerja dan industri kekinian.

Menjadi tuntutan Perguruan tinggi untuk memberi penekanan pada pengembangan keterampilan peserta didiknya, merancang program-program yang dibutuhkan peserta didik di

masa depan, serta kemitraan dengan dunia industri, serta harus menjadi wadah bagi para mahasiswa untuk mendapatkan keterampilan yang siap pakai untuk memenuhi kebutuhan industri yang terus meningkat.

Mengutip **A.Yusrin** (2019), Lembaga The Montreal AI Ethics Institute merilis hasil survey mereka yang dapat dijadikan acuan perguruan tinggi kita dalam berinovasi untuk menghasilkan lulusan yang kompeten di era industri 4.0. The Montreal AI Ethics Institute melakukan Survei terhadap 400 orang tentang topik "*Peluang Kerja Masa Depan*". Survei ini berangkat dari hasil laporan "*Future of Jobs* " dari World Economic Forum ( WEF) yang memperkirakan 75 juta pekerjaan di seluruh dunia akan diambil alih oleh otomasi pada tahun 2022.

Di saat yang sama 133 juta pekerjaan baru juga akan muncul ke ekonomi global, tetapi dalam banyak kasus, para orang akan kehilangan pekerjaan kerana tidak memiliki kualifikasi yang diperlukan untuk mengisi posisi baru tersebut. Oleh karena itu, The Montreal AI Ethics Institute memberikan 4 rekomendasi untuk mendesain ulang pendidikan tinggi untuk bisa menghasilkan lulusan yang siap kerja menghadapi revolusi industri 4.0. Kelima inovasi pendidikan tinggi tersebut yakni:

### **1. Fokuskan waktu kuliah**

Standar kelulusan gelar 4 tahun tradisional secara luas masih dianggap sebagai persyaratan standar untuk kesuksesan karir. Namun dalam berbagai bidang, pendidikan tinggi 4 tahun sering memaksa mahasiswa banyak mempelajari subyek kuliah yang tidak berguna

### **2. Pangkas sistem kredit**

Sistem kredit akademik di atas kertas dianggap tidak memberikan banyak pengaruh kesiapan kerja yang sebenarnya. Oleh karena itu, lembaga ini mendorong untuk meningkatkan kualifikasi lulusan dengan cara lain, seperti melalui pembelajaran online, program sertifikasi, pengajaran mandiri dan kewirausahaan

### **3. Kerja sama industri**

The Montreal AI Ethics Institute melihat ketika lembaga pendidikan tinggi bermitra dengan industri, semua orang mendapat manfaat. Siswa mendapatkan peningkatan akses ke mentor dan magang, sekolah meningkatkan relevansi kurikulum, dan perusahaan mendapatkan tenaga kerja sesuai kebutuhan mereka.

### **4. Pembelajaran berbasis proyek**

Karier modern membutuhkan kreativitas, pemikiran kritis, keterampilan interpersonal, keterampilan komunikasi, dan negosiasi. Salah satu cara mengintegrasikan keterampilan dunia nyata ini ke dalam kampus adalah melalui pembelajaran berbasis proyek. Dengan meminta siswa merencanakan, merancang, dan melaksanakan proyek mereka sendiri, mereka belajar berfungsi sebagaimana adanya di pasar kerja yang terus berkembang.

Kemudian yang menjadi bagian utama yang harus dijamin adalah ketika lulusan benar-benar menjadi SDM yang kompeten dalam menghadapi revolusi industri 4.0 dengan era digitalnya dengan menguasai 3 ranah yaitu *Attitude*, *Skill* dan *Knowledge*.

Maka selanjutnya supaya tidak hanya melahirkan lulusan SDM tidak hanya pada *hard skills* semata namun utamanya adalah *soft skills* yang dapat ditanamkan di dunia pendidikan maka PT harus melakukan integrasi penanaman *soft skills* dalam setiap kurikulum yang ada.

*Soft skills* adalah keterampilan seseorang dalam berhubungan dengan orang lain (interpersonal skills) dan keterampilan dalam mengatur dirinya sendiri (intrapersonal skills) untuk kerja secara maksimal. Ada banyak keterampilan yang dibutuhkan dalam pendidikan abad 21 saat ini seperti *creativity, critical thinking, problem solving, communication, collaboration, team-working, leadership, digital literacy, emotional intelligence, entrepreneurship, dan global citizenship.*

Pentingnya *soft skills* terlihat dengan jelas pada 10 kiat sukses orang-orang yang tersukses di Amerika sebagaimana kesimpulan buku "*Lesson From The Top*" karangan **Neff** dan **Citrin** dalam **Asmuni** (2014), yaitu:

1. *Passion*
2. *Intelligence and clarity of thinking*
3. *Great communication skills*
4. *High energy level*
5. *Egos in check*
6. *Inner peace*
7. *Capitalizing early life experience*
8. *Strong family lifes*
9. *Positive attitude*
10. *Focus on "doing the right things right".*

Temuan lainnya, kesuksesan seseorang di dalam dunia kerja, bukan karena faktor kemampuan akademisnya. Bukan karena kemampuan teknikal atau hard skills seseorang. Banyak penelitian menunjukkan bahwa, kesuksesan seseorang di dalam dunia kerja itu bukan didasarkan karena kemampuan teknikal. Kemampuan teknikal hanya menyumbang sebesar sepeluh persen

untuk kesuksesannya, dan sisanya 80 persen disumbang oleh kemampuan non akademis atau *soft skills*.

### **C. Pendekatan OBE dalam Pengembangan dan Pelaksanaan Kurikulum**

Kurikulum merupakan nyawa dari suatu program pembelajaran sehingga keberadaannya memerlukan rancangan, pelaksanaan serta evaluasi secara dinamis sesuai dengan perkembangan zaman, kebutuhan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Seni (IPTEKS) serta kompetensi yang dibutuhkan oleh masyarakat, maupun pengguna lulusan perguruan tinggi. Perkembangan IPTEKS di abad ke-21 yang berlangsung secara cepat mengikuti pola logaritma, menyebabkan Standar Pendidikan Tinggi (SN-Dikti) juga mengikuti perubahan tersebut. Dalam kurun waktu enam tahun SN-Dikti telah mengalami tiga kali perubahan, yaitu dari Permenristekdikti No 49 tahun 2014 diubah menjadi Permenristekdikti No 44 tahun 2015, dan terakhir diubah menjadi Permendikbud No 3 tahun 2020 seiring dengan kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tentang Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM). Bagi khalayak umum seringkali perubahan tersebut dipersepsikan secara keliru sebagai suatu keharusan bahwa setiap ganti menteri pendidikan, ganti pula kurikulum pendidikannya. Akan tetapi sesungguhnya perubahan kurikulum pendidikan merupakan keniscayaan sepanjang tidak bertentangan dengan filosofi pendidikan serta peraturan yang berlaku.

Terbitnya Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, mendorong semua perguruan tinggi untuk menyesuaikan diri dengan ketentuan tersebut. KKNI merupakan pernyataan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia yang penjenjangan

kualifikasinya didasarkan pada tingkat kemampuan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran (learning outcomes). Perguruan tinggi sebagai penghasil SDM terdidik perlu mengukur lulusannya, apakah lulusan yang dihasilkan memiliki ‘kemampuan’ setara dengan ‘kemampuan’ (capaian pembelajaran) yang telah dirumuskan dalam jenjang kualifikasi KKNI. Sebagai kesepakatan nasional, ditetapkan lulusan Program Sarjana/Sarjana Terapan misalnya paling rendah harus memiliki “kemampuan” yang setara dengan “capaian pembelajaran” yang dirumuskan pada jenjang 6 KKNI, Magister/Magister Terapan setara jenjang 8, dan Doktor/Doktor Terapan setara jenjang 9.

Perguruan tinggi dalam menyusun atau mengembangkan kurikulum, wajib mengacu pada KKNI dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Tantangan yang dihadapi oleh perguruan tinggi dalam pengembangan kurikulum di era Industri 4.0 adalah menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan literasi baru meliputi literasi data, literasi teknologi, dan literasi manusia yang berakhlak mulia berdasarkan pemahaman keyakinan agama. Perguruan tinggi perlu melakukan reorientasi pengembangan kurikulum yang mampu menjawab tantangan tersebut.

Kurikulum pendidikan tinggi merupakan program untuk menghasilkan lulusan, sehingga program tersebut seharusnya menjamin agar lulusannya memiliki kualifikasi yang setara dengan kualifikasi yang disepakati dalam KKNI. Konsep yang dikembangkan Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan selama ini, dalam menyusun kurikulum dimulai dengan menetapkan profil lulusan yang dijabarkan menjadi rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL). Rumusan kemampuan pada deskriptor KKNI dinyatakan dengan istilah capaian pembelajaran (terjemahan dari learning outcomes), dimana kompetensi tercakup di dalamnya atau merupakan bagian dari capaian pembelajaran (CP). Penggunaan istilah kompetensi yang digunakan dalam pendidikan tinggi (DIKTI) ditemukan pada Permendikbud No. 3 Tahun 2020

tentang SN-DIKTI pasal 5, ayat (1), yang menyatakan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL).

Deskripsi capaian pembelajaran dalam KKNI, mengandung empat unsur, yaitu unsur sikap dan tata nilai, unsur kemampuan kerja, unsur penguasaan keilmuan, dan unsur kewenangan dan tanggung jawab. Sedangkan pada SN-Dikti rumusan CPL tercakup dalam salah satu standar yaitu Standar Kompetensi Lulusan (SKL). Dalam SN-Dikti, CPL terdiri dari unsur sikap, keterampilan umum, keterampilan khusus, dan pengetahuan. Unsur sikap dan keterampilan umum telah dirumuskan secara rinci dan tercantum dalam lampiran SN-Dikti, sedangkan unsur keterampilan khusus dan pengetahuan harus dirumuskan oleh forum program studi sejenis yang merupakan ciri lulusan prodi tersebut. Berdasarkan CPL tersebut penyusunan kurikulum suatu program studi dapat dikembangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, dinyatakan bahwa penyusunan kurikulum adalah hak perguruan tinggi, tetapi selanjutnya dinyatakan harus mengacu kepada standar nasional (Pasal 35 ayat (1)). Secara garis besar kurikulum, sebagai sebuah rancangan, terdiri atas empat unsur, yakni capaian pembelajaran, bahan kajian, proses pembelajaran untuk mencapai, dan penilaian.

Perumusan CPL mengacu pada deskriptor KKNI khususnya pada bagian Pengetahuan dan Keterampilan khusus, sedangkan pada bagian Sikap dan Keterampilan Umum dapat diadopsi dari SN-Dikti. Sedangkan penyusunan kurikulum selengkapnya mengacu pada delapan (8) Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan 8 Standar Nasional Penelitian, dan delapan (8) Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.

Kurikulum pendidikan tinggi didefinisikan sebagai seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan ajar serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi. Berdasarkan pengertian tersebut perencanaan dan pengaturan kurikulum sebagai sebuah siklus kurikulum memiliki beberapa tahapan dimulai dari analisis kebutuhan, perancangan, pengembangan, pelaksanaan, evaluasi, dan tindak lanjut perbaikan yang dilakukan oleh program studi (Ornstein & Hunkins, 2014). Siklus kurikulum tersebut berjalan dalam rangka menghasilkan lulusan sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan program studi yang telah ditetapkan. Siklus kurikulum tersebut dapat digambarkan dalam bentuk Gambar 1.



Setiap tahapan pada siklus kurikulum tersebut dilakukan dengan mengacu pada SNDikti yang terdiri dari delapan (8) standar yakni Standar Kompetensi Lulusan, Standar Isi Pembelajaran,

Standar Proses Pembelajaran, Standar Penilaian Pembelajaran, Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan, Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran, Standar Pengelolaan, dan Standar Pembiayaan Pembelajaran. Jika ke-delapan standar tersebut dikaitkan dengan pengembangan dan pelaksanaan kurikulum, ilustrasi ditunjukkan dalam Gambar 2.



Gambar 3. SN-Dikti Kaitannya dengan Pengembangan dan Pelaksanaan Kurikulum

Gambar 3 menjelaskan kaitan antara pengembangan dan pelaksanaan kurikulum pendidikan tinggi dengan SN-Dikti melalui kajian di setiap unsur dari pelaksanaan kurikulum tersebut, serta pentingnya perbaikan berkelanjutan melalui Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) maupun Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) dalam ranah ke-delapan standar pada SN-Dikti. Hal penting yang perlu diperhatikan dalam pengembangan, pelaksanaan, evaluasi kurikulum berdasarkan SN-Dikti dinyatakan bahwasanya SKL/CPL merupakan acuan atau landasan utamanya. Dengan demikian Kurikulum Pendidikan Tinggi yang telah dikembangkan

berdasarkan SN-Dikti sesungguhnya telah menggunakan pendekatan Outcome Based Education (OBE). Hal ini sangat mendukung Kurikulum. Program Studi pada saat ikut serta dalam akreditasi internasional yang berlandaskan pendekatan OBE.

Prinsip siklus kurikulum dengan pendekatan OBE dapat digambarkan secara sederhana melalui Gambar 3.



Gambar 4. Kurikulum dengan Pendekatan OBE

Beragam model pendekatan atau paradigma OBE yang digunakan dalam pengembangan dan pelaksanaan kurikulum, di antaranya yang paling sederhana terdiri dari tiga tahapan yang saling berinteraksi, dapat dijelaskan secara singkat sebagai berikut:

a. **Outcome Based Curriculum (OBC)**, pengembangan kurikulum yang didasarkan pada profil dan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL). Ber landaskan CPL ini kemudian diturunkan bahan

kajian (body of knowledge), pembentukan mata kuliah beserta bobot sks nya, peta kurikulum, desain pembelajaran yang dinyatakan dalam bentuk Rencana Pembelajaran Semester (RPS), mengembangkan bahan ajar, serta mengembangkan instrumen penilaian dan evaluasi. Pertanyaan penting adalah bagaimana dengan OBC, kurikulum dikembangkan secara selaras berdasarkan CPL?

b. **Outcome Based Learning and Teaching (OBLT)**, pelaksanaan kegiatan pembelajaran yang didefinisikan sebagai interaksi dalam kegiatan belajar antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar. Salah satu prinsip penting OBLT adalah ketepatan pemilihan bentuk dan metode pembelajaran yang akan dilakukan oleh mahasiswa wajib mengacu dan sesuai dengan CPL. Bentuk pembelajaran termasuk, bentuk pembelajaran di luar prodi atau kampus pada program Merdeka Belajar–Kampus Merdeka. Pertanyaan penting adalah bagaimana dengan OBLT, CPL dapat dicapai?

c. **Outcome Based Assessment and Evaluation (OBAE)**, pendekatan penilaian dan evaluasi yang dilakukan pada pencapaian CPL dalam rangka untuk peningkatan kualitas pembelajaran yang berkelanjutan. Penilaian dilakukan pada proses pembelajaran dan pada hasil pencapaian CPL. Demikian juga evaluasi kurikulum dilakukan pada pencapaian CPL Program Studi, dan hasilnya digunakan untuk perbaikan berkelanjutan. Dapat disimpulkan paradigma atau pendekatan OBE, pertama sangat sesuai dengan SN-Dikti. Kedua, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kurikulum berfokus pada pencapaian CPL. Ketiga, dalam implementasinya untuk keperluan akreditasi nasional maupun internasional pelaksanaan OBE sangat di perlukan dukungan dokumen atau data-data yang sah sebagai bukti.

#### **D. Permasalahan Penerapan OBE**

Tantangan guru atau dosen dalam penerapan OBE di pendidikan vokasi meliputi empat tantangan utama, yaitu: 1) Beban kerja dosen; 2) Penyampaian kurikulum yang buruk; 3) Sistem implementasi yang tidak stabil; dan 4) kurangnya dukungan administrator (Damit et al., 2021). Masalah utama dengan implementasi pendidikan berbasis hasil adalah definisi luas dari pendidikan berbasis hasil pendidikan itu sendiri (Rajae et al., 2013). Pemahaman tentang bagaimana merancang pendidikan berbasis hasil (OBE) diawali dari seberapa jauh seorang dosen mampu merancang tahapan-tahapan penyusunannya.

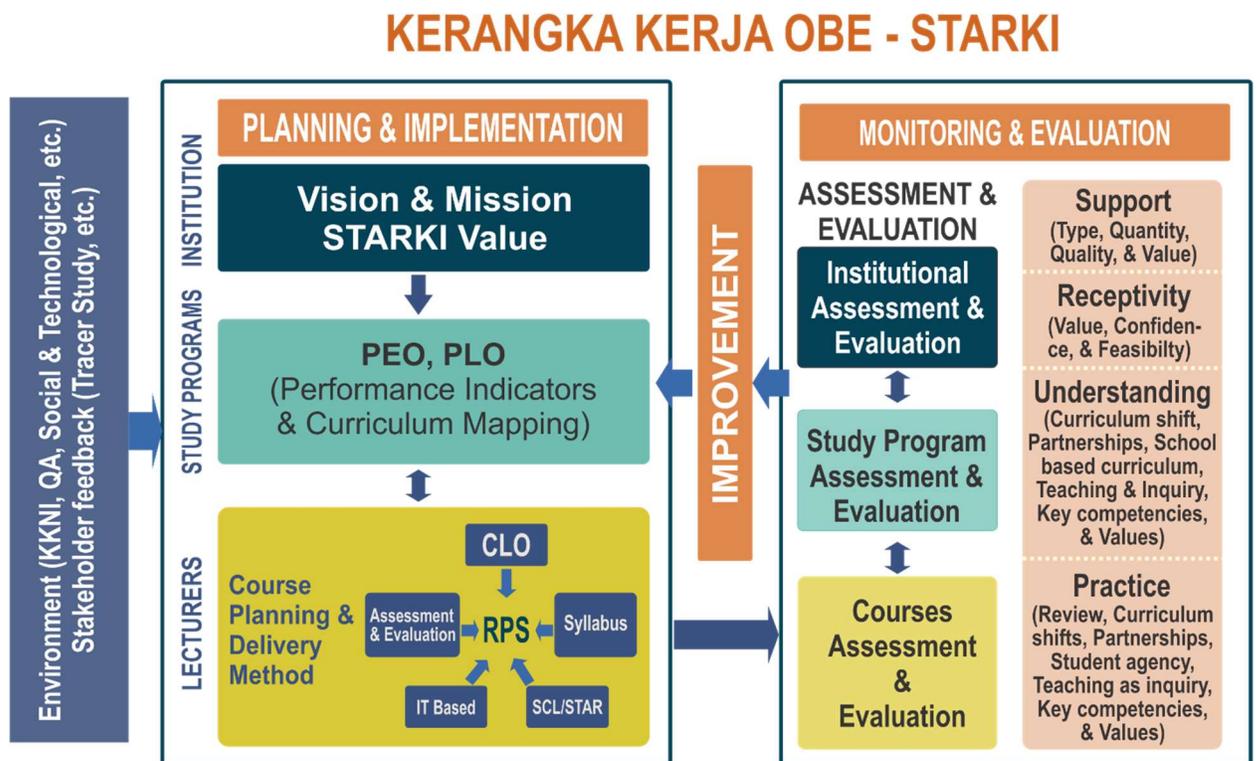
Sementara Shaheen (2019) mengatakan terdapat 12 tantangan penerapan OBE yaitu 1) Tantangan Penerimaan OBE; 2) Pergeseran Paradigma; 3) Menjaga Kualitas Pendidikan; 4) Merestrukturisasi Hasil dan Teknik Penilaian; 5) OBE sebagai Prioritas Utama; 6) Pendekatan *Design Down*; 7) Dampak pada Siswa Berkebutuhan Khusus; 8) Peran Guru; 9) Tanggung jawab pembelajaran; 10) Break Typecast; 11) Gelombang Oposisi; dan 12) Persepsi Siswa dan Guru.

#### **E. Implementasi OBE**

OBE adalah teori pendidikan yang mendasarkan setiap bagian dari sistem pendidikan di sekitar tujuan (hasil). Menurut Ron Brandt (1992), “pendidikan berbasis hasil (OBE) adalah tentang mempersiapkan siswa untuk hidup, bukan hanya menyiapkan mereka untuk kuliah atau pekerjaan”. Hal ini didasarkan pada empat konsep, 1) kejelasan fokus (desain kurikulum, penyampaian pembelajaran, penilaian sesuai dengan hasil yang diharapkan), 2) kesempatan yang diperluas (cara dan berapa kali siswa mendapatkan kesempatan untuk belajar dan mendemonstrasikan), 3) harapan yang tinggi (semua siswa mampu melakukan hal-hal yang signifikan) dan 4) design down (mendesain kurikulum dari perspektif hasil yang diharapkan).

Metode berbasis hasil telah diadopsi dalam sistem pendidikan di seluruh dunia, di berbagai tingkatan.

OBE adalah proses transformasi yang membantu mahasiswa untuk mengembangkan keterampilan yang berbeda pada tingkat yang berbeda, dan memastikan bahwa kinerja mereka diukur secara akurat untuk meningkatkan kualitas program dan lulusan. Langkah-langkah implementasi OBE pada pendidikan vokasi terdiri dari empat langkah yaitu Perencanaan, Pelaksanaan, Monitoring dan Evaluasi serta Pengembangan Berkelanjutan. Keempat langkah tersebut digambarkan pada Gambar 4.



Gambar 4. Kerangka Kerja OBE

1. Langkah Perencanaan
  - a. Komite Pengembangan Kurikulum

Membentuk komite atau tim yang terdiri dari pendidik dan staf administrasi yang memahami pengembangan kurikulum dan OBE untuk mengembangkan model kerja. Komite pengembangan kurikulum harus melakukan penelitian tentang praktik yang efektif untuk mendukung lingkungan kelembagaan yang menawarkan pengalaman belajar yang kaya dan beragam. Komite harus meninjau kebijakan dan perilaku yang mendorong keterlibatan masyarakat dan kesempatan yang sama untuk semua. Selanjutnya, panitia harus mempertimbangkan kegiatan pengembangan profesional untuk mendukung isi, instruksi, dan harapan penilaian. Perencanaan dan bukti yang tepat tentang proses OBE harus dilakukan oleh komite ini untuk dianalisis sebelum menyajikan fakta-fakta yang relevan kepada para pemangku kepentingan.

b. Melakukan kajian visi dan misi perguruan tinggi

1) Melakukan kajian visi, misi, dan nilai-nilai (core value) yang dianut perguruan tinggi penting karena setiap institusi memiliki identitas unik dan pernyataan misi yang menentukan jenis program yang ditawarkan, dan atribut lulusan institusi. Hasil program pendidikan (Programme Educational Objective=PEO) dan hasil program pembelajaran (Programme Learning Outcomes=PLOs) juga harus ditinjau untuk memenuhi domain pembelajaran IQF, sedangkan modul yang dipilih dalam program harus mendukung PLO dan melengkapi hasil di tingkat modul. Setiap hasil harus sesuai dengan cakupan yang lebih besar dalam memenuhi visi dan misi institusi dan program studi. Ketentuan tentang hasil spesifik pada tingkat modul akan membantu memfasilitasi analisis data penilaian. Ini akan memastikan kesinambungan, keberlanjutan, dan kualitas program melalui perancah, dan selanjutnya memastikan konsistensi di kalangan akademisi. Seperti yang disarankan oleh Reich et al. (2019a),

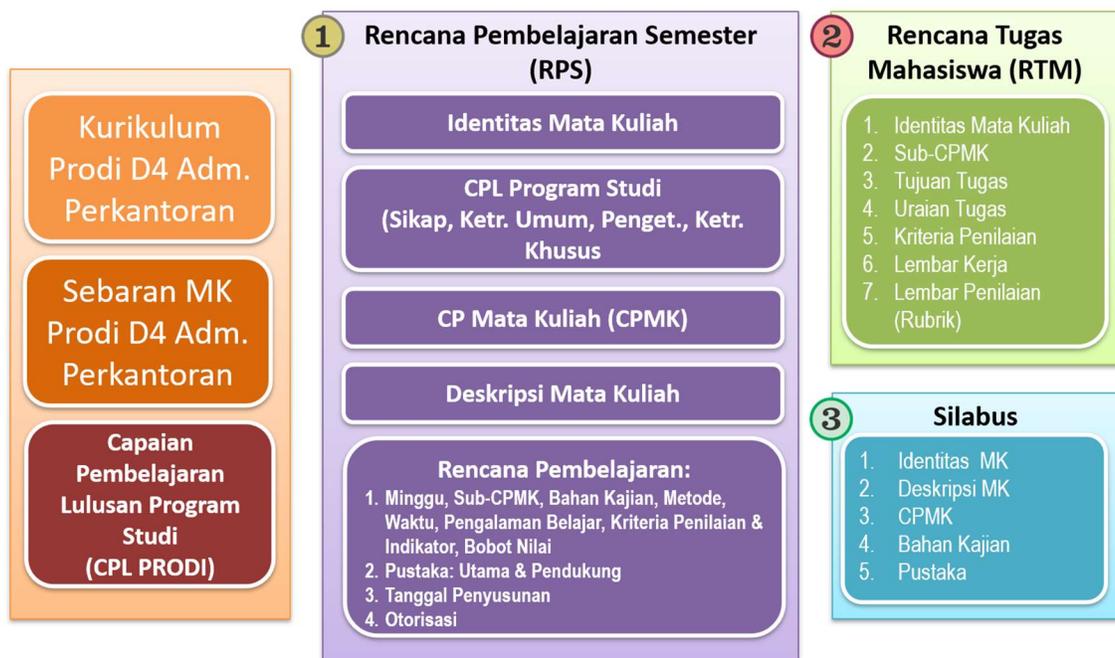
hasil pembelajaran harus relevan, terukur, tepat waktu, spesifik dan dapat dicapai. Setelah meninjau pernyataan visi dan misi lembaga, PEO, dan PLO dari program, penting untuk membuat peta kurikulum yang akan menunjukkan keterkaitan setiap modul dengan PLO. Dari peta kurikulum, gugus tugas akan dapat mengidentifikasi modul yang sesuai yang memerlukan penilaian khusus untuk pengumpulan data. Awalnya, modul inti umum yang didaftarkan oleh siswa di berbagai program dipilih. Hal ini bertentangan dengan pendekatan yang dilakukan Djoundourian (2017), dimana institusi pendidikan disarankan untuk memilih modul dan penilaian yang dapat memenuhi tujuan yang relevan.

- 2) Pada tingkat Program Studi dilakukan Penyusunan profil lulusan/Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) atau disebut Program Educational Objectives (PEO) disertai indikator kinerja dan pemetaan kurikulum.

Program Educational Objectives (PEO) adalah ekspresi dari tujuan jangka panjang yang menggambarkan karir dan pencapaian profesional bahwa program sedang mempersiapkan mahasiswa untuk mencapai dalam waktu 3 sampai 5 tahun setelah lulus. Sedangkan Program Learning Outcomes (PLO) menjelaskan apa yang harus dapat dilakukan oleh lulusan suatu program sebagai hasil dari pengalaman belajar dalam program tersebut. Hasil belajar berkaitan dengan prestasi pelajar yang dinyatakan dalam tujuan modul atau mata kuliah. Hasil belajar adalah pernyataan tentang apa yang harus diketahui, dipahami, dan dapat dilakukan mahasiswa setelah menyelesaikan suatu masa studi. Indikator dari ketercapaian LO akan menentukan bentuk asesmen yang tepat. Perspektif yang berbeda antara dosen dengan mahasiswa saat dilakukan asesmen perlu diklarifikasi / dijelaskan kepada mahasiswa. Sehingga

kedua belah pihak: yaitu dosen dan mahasiswa mempunyai pandangan yang sama/keputusan yang sama dalam model asesmen yang dilakukan. Apabila mahasiswa sudah mengetahui sejak awal LO yang diharapkan dan model asesmen yang akan digunakan, maka mereka akan swa atur dalam model pembelajaran yang akan mereka tentukan.

- 3) Dosen: Penyusunan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) yang meliputi Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK), deskripsi silabus, Rencana Tugas Mahasiswa (RTM), metode penyampaian, dukungan IT, dan penilaian. Pada Gambar 5 ditampilkan hal-hal apa saja yang harus diperhatikan dengan penyusunan RPS, Silabus, dan RTM.



Gambar 5. Penyusunan RPS, RTM, dan Silabus

Jenis penilaian program pendidikan harus dipertimbangkan, termasuk penilaian langsung dan tidak langsung. Penilaian langsung penting dilakukan untuk menilai

pengalaman belajar siswa dengan memperhatikan silabus, rencana pembelajaran semester, metode belajar mengajar, jenis penilaian, jam belajar, dan komponen lainnya. Pelaksanaan program pembelajaran harus diamati dan dipantau secara kontinyu untuk melihat konsistensi antara apa yang sudah direncanakan dengan hasil yang diperoleh. Penilaian tidak langsung, seperti kepuasan pemberi kerja dan penempatan kerja lulusan, adalah metode untuk mendapatkan umpan balik dari pemangku kepentingan eksternal tentang kualitas lulusan untuk membantu meningkatkan program (Djoundourian, 2017; Reich et al., 2019b).

Hasil pembelajaran program pendidikan harus ditinjau untuk memastikan bahwa metodologi pengajaran dan proses pembelajaran, dan penilaian dapat dipetakan secara lebih sistematis yang dapat memberikan bukti tentang proses OBE dan berfungsi sebagai umpan balik pembelajaran dan informasi hasil kegiatan praktik kerja industri atau magang.

Pengembangan rubrik dimaksudkan untuk memberikan standarisasi pengukuran dan evaluasi kinerja siswa. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Reich et al. (2019b) yang menyarankan evaluasi kinerja siswa yang cepat dan tepat dapat digunakan untuk pelaporan OBE. Pada tahap ini, kursus dipilih dari ujian akhir, karena tugas dapat digunakan sebagai alat untuk mengukur pengetahuan, dan menilai pemecahan masalah dan keterampilan penting lainnya di antara siswa. Hal ini lebih lanjut didukung oleh Rust (2002); dan Gibbs dan Simpson (2004), dan menegaskan bahwa ujian akhir menekankan pengetahuan dan keterampilan pemecahan masalah, tetapi bukan keterampilan esensial. Relatif, kursus dianggap sebagai metode penilaian yang jauh lebih baik karena dapat mengukur keterampilan dan kemampuan yang lebih luas, dan dianggap sebagai indikator yang lebih baik untuk proses dan pengalaman belajar siswa.

Rubrik yang dikembangkan merupakan hasil usaha dari para akademisi yang terlibat. Beberapa uji coba menggunakan sampel dilakukan untuk menyempurnakan rubrik. Melalui tes ini, kekurangan diidentifikasi dan tindakan diambil untuk meningkatkan analisis data penilaian. Seperti yang didukung oleh Kim dan Helms (2016) dan Reich et al. (2019b), pengujian dilakukan untuk memastikan bahwa rubrik yang dikembangkan dapat menjadi pedoman penilaian di sekolah dan menghilangkan bias. Selain itu, ini meningkatkan kekokohan analisis dengan membandingkan hasil di seluruh modul dalam program yang berbeda. Rubrik yang dihasilkan bersifat generik, dan memberikan fleksibilitas kepada akademisi untuk membuat perubahan yang diperlukan ketika mereka mengadopsi rubrik ini dalam modul mereka. Secara bersamaan, rubrik memungkinkan kinerja siswa untuk dibandingkan dan digunakan untuk tujuan benchmarking.

4) Rujukan eksternal (Peraturan di tingkat nasional maupun internasional, stakeholder feedback, lingkungan).

## 2. Pelaksanaan

Pelaksanaan yang memperhatikan metode pembelajaran, materi pembelajaran, keragaman sumber belajar, dan fasilitas. Pembelajaran yang inovatif dengan metode SCL memiliki keragaman model pembelajaran yang menuntut partisipasi aktif dari mahasiswa Metode-metode tersebut diantaranya adalah: (a). Berbagi informasi (Information Sharing) dengan cara: curah gagasan (brainstorming), kooperatif, kolaboratif, diskusi kelompok (group discussion), diskusi panel (panel discussion), simposium, dan seminar; (b). Belajar dari pengalaman (Experience Based) dengan cara simulasi, bermain peran (roleplay), permainan (game), dan

kelompok temu; (c). Pembelajaran melalui Pemecahan Masalah (Problem Solving Based) dengan cara: Studi kasus, tutorial, dan lokakarya Metode SCL kini dianggap lebih sesuai dengan kondisi eksternal masa kini yang menjadi tantangan bagi mahasiswa untuk mampu mengambil keputusan secara efektif terhadap problematika yang dihadapinya.

### 3. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring yang dilakukan harus terjadwal, frekuensi, menggunakan alat monev yang baik, dalam lingkup universitas, program studi, dan dosen. Model yang digunakan untuk melakukan monitoring dan evaluasi sebagaimana yang disampaikan oleh Sinnema (2011) yaitu **Support, Receptivity, Understanding, dan Practice**. Keempat dari alat monev ini diuraikan sebagai berikut:

- a. Dukungan (Support) adalah jenis dukungan yang ditemui pendidik (termasuk orang-orang di dalam dan di luar sekolah, publikasi, dan web) dan betapa berharganya dukungan itu bagi mahasiswa. Data dikumpulkan tentang sejauh mana pendidik telah menemukan berbagai tipe (type) dukungan (termasuk orang-orang di dalam dan di luar sekolah mereka, publikasi cetak dan materi online) dan seberapa bernilai (value) dan berkualitas (quality) mereka menganggap dukungan tersebut.
- b. Penerimaan (Receptivity) adalah sejauh mana pendidik menghargai (value) kurikulum, kepercayaan diri (confidence) dalam mengimplementasikannya dalam konteks mahasiswa sendiri, dan sejauh mana mahasiswa menganggap implementasi itu layak (feasibility).
- c. Pemahaman (Understanding) adalah bagaimana pendidik memahami berbagai elemen kunci dari kurikulum baru (termasuk mengajar sebagai inkuiri, nilai, prinsip, kompetensi

utama, visi, dan bidang pembelajaran). dan pandangan mahasiswa tentang sejauh mana perubahan yang diperlukan atau ditawarkan pada kurikulum baru.

Kurikulum dirancang dengan penekanan kekhasan perguruan tinggi yaitu menetapkan prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang harus tercermin dalam program pengajaran dan pembelajaran. Alat evaluasi meminta praktisi untuk melaporkan tidak hanya berapa banyak, dan apa yang mereka terapkan dalam kaitannya dengan aspek-aspek ini, tetapi juga memeriksa pemahaman kurikulum yang mendasari laporan tersebut. Yang menarik adalah sejauh mana pemahaman tersebut selaras dengan niat kurikulum seperti yang diungkapkan oleh para ahli yang telah terlibat erat dalam merancang kurikulum.

- d. Praktik (Practice) adalah sejauh mana praktik yang mencerminkan tujuan kurikulum baru menjadi jelas dalam praktik pemimpin dan dosen. Alasan utama untuk perubahan kurikulum terkait dengan mengejar peningkatan pengajaran dan pembelajaran. Oleh karena itu, penting juga untuk mengumpulkan data tentang praktik pengajaran yang sesuai dengan kurikulum baru. Yang menarik adalah sejauh mana praktik yang mencerminkan niat kurikulum baru menjadi jelas dalam praktik para pemimpin dan guru. Item latihan tidak dirancang untuk mengukur kepatuhan terhadap penggunaan strategi tertentu, urutan, materi, atau ketentuan durasi untuk praktik tertentu seperti yang sering terjadi dalam evaluasi yang berkaitan dengan "kesetiaan implementasi" (O'Donnell, 2008). Sebaliknya, mereka dirancang untuk mengukur sifat praktik yang ditekankan guru dalam pekerjaan mereka dengan siswa. Mereka tentang praktik yang lebih umum yang dianggap sebagai indikator niat kurikulum yang direalisasikan

#### 4. Pengembangan Berkelanjutan

Pencapaian semua hasil (PEO, PLO dan CLO) harus diukur dan digunakan sebagai pengukur efektivitasnya. Metode pengukuran bervariasi dari survei diri siswa, survei eksternal dan penilaian formal. Setelah tahap pengecekan, hasilnya dianalisis. Setiap kekurangan pada tingkat pencapaian hasil dapat diatasi dan perbaikan lebih lanjut dapat dilakukan pada tahap 'Perencanaan ulang'. Siklus P-D-C-A (Plan-Do-Check-Act) kemudian berlanjut sampai tingkat pencapaian yang memadai terpenuhi untuk semua hasil. Keseluruhan kegiatan P-D-C-A dapat diringkas dalam konteks pencapaian CLO dan PLO, seperti yang ditunjukkan pada Gambar 7. Gambar tersebut menunjukkan berbagai kegiatan yang dilakukan dalam menggunakan pendekatan OBE sebagai dasar CQI (Continuous Quality Improvement) untuk program.

Menganalisis luaran pembelajaran untuk menganalisis kinerja siswa berdasarkan silabus, rencana pembelajaran, metodologi belajar-mengajar, dan jenis penilaian. Akademisi dan koordinator program wajib mengajukan inisiatif yang dapat meningkatkan kinerja mahasiswa secara keseluruhan dan pengalaman belajar mahasiswa pada semester-semester mendatang. Semua informasi dan diskusi didokumentasikan yang akan memungkinkan penilaian ulang kinerja siswa di masa depan. Lebih jauh lagi, hal ini menciptakan kesadaran di kalangan akademisi untuk perbaikan berkelanjutan dari kursus dan/atau program untuk meningkatkan pengalaman belajar siswa, sebagaimana didukung oleh Kim dan Helms (2016) dan Reich et al. (2019b). Selain itu, Reich et al. (2019b) dan Hill dan Wang (2018) menyarankan agar hasilnya dibagikan dengan pemangku kepentingan terkait lainnya seperti pakar industri untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan kursus atau program yang ditawarkan di institusi.

## **F. Penutup**

Sistem pendidikan tradisional kehilangan signifikansinya di era globalisasi. Semua hal berubah dengan sangat cepat dan terus-menerus di dunia saat ini. Lebih banyak keterampilan diperlukan untuk mengembangkan teknologi dengan sangat cepat. Untuk menghadapi perkembangan teknologi, organisasi akademik harus menghasilkan lulusan. Oleh karena itu, adalah wajib untuk beralih dari pendidikan tradisional ke pendidikan berbasis hasil untuk mengatasi kebutuhan tersebut. Tantangan pendidikan abad 21 adalah peran dan strategi dalam menjembatani kesenjangan antara proses pendidikan di Perguruan Tinggi dengan dunia kerja dan kebutuhan inovasi. Salah satu pendekatan yang digunakan untuk mewartakan pendidikan abad 21 adalah Outcome-Based Education (OBE). OBE adalah pendekatan yang menekankan pada keberlanjutan proses pembelajaran secara inovatif, interaktif, dan efektif. OBE berpengaruh pada keseluruhan proses pendidikan dari rancangan kurikulum; perumusan tujuan dan capaian pembelajaran; strategi pendidikan; rancangan metode pembelajaran; prosedur penilaian; dan lingkungan/ekosistem pendidikan.

Berfokus pada hasil Pendidikan berbasis hasil (Outcome-based education/OBE) menghasilkan harapan yang transparan atas hasil yang maksimal. Mahasiswa dapat memahami apa yang mereka harapkan, dan dosen dapat memahami apa yang perlu mereka tunjukkan selama proses pembelajaran. Kejelasan sangat penting karena perlu untuk menjadi jelas di semua tingkatan capaian pembelajaran, sehingga mahasiswa dapat menunjukkan semua kemampuan yang diperlukan untuk mencapai hasil.

OBE tidak menentukan metodologi instruksional tertentu, dosen bebas untuk memilih metodologi pembelajaran sesuai dengan keragaman di antara mahasiswa dengan menerapkan berbagai teknik pengajaran dan penilaian karena OBE adalah model pembelajaran yang berpusat

pada siswa. Dosen akan memfasilitasi mahasiswa untuk memahami konsep dengan cara apapun (panduan belajar, kerja kelompok, kolaborasi, seminar, dan sebagainya) sesuai dengan rencana pembelajaran yang disusun.

Partisipasi mahasiswa dalam suatu institusi juga merupakan komponen penting dari OBE. Mahasiswa mengukur secara tepat harus berusaha untuk belajar sendiri. Keterlibatan mahasiswa dalam proses pembelajaran akan meningkatkan pengalaman belajar untuk mendapatkan berbagai luaran seperti tanggung jawab, kemandirian, berfikir positif, kreatif, inovatif, kerja sama, dan sebagainya.

## Daftar Pustaka

- Brandt, R. (1992). On outcome-based education: A conversation with Bill Spady. *Educational Leadership*, 50, 66-66.
- Damit, M. A. A., Omar, M. K., & Puad, M. H. M. (2021). Issues and Challenges of Outcome based Education (OBE) Implementation among Malaysian Vocational College Teachers. *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, 11(3), 197-211.
- Mamat, M. R., Rasul, M. S., & Mustapha, A. (2014). Outcome-based education implementation in malaysian polytechnic. *International Journal of Education and Research*, 2(11), 437-450.
- Monitoring , Evaluation , and Learning in USAID Biodiversity Programming: An USAID Biodiversity How-To Guide 3. 2016;(August):1-40.
- Rajae, N., Junaidi, E., Taib, S. N. L., Salleh, S. F., & Munot, M. A. (2013). Issues and challenges in implementing outcome based education in engineering education. *International Journal for Innovation Education and Research*, 1(4), 1-9.
- Shaheen, S. (2019). Theoretical perspectives and current challenges of OBE framework. *Int. J. Eng. Edu*, 1, 122-129.
- Sinnema, C. (2011). *Monitoring and evaluating curriculum implementation: Final evaluation report on the implementation of the New Zealand Curriculum 2008-2009*. New Zealand: Ministry of Education.
- Sinnema, Claire (2011). *Monitoring and Evaluating Curriculum Implementation - Final Evaluation Report on the Implementation of The New Zealand Curriculum 2008-2009*, Report to the Ministry of Education. New Zealand: Auckland UniServices Ltd.
- Sun, P. H., & Lee, S. Y. (2020). The importance and challenges of outcome-based education – a case study in a private higher education institution. *Malaysian Journal of Learning and Instruction*, 17 (2), 253-278. <https://doi.org/10.32890/mjli2020.17.2.9>
- United States Agency for International Development. Defining Outcomes & Indicators for Yoto. (2016, October). Vocational education development strategy to improve quality of human resources in dealing with Asean Economic Community. In *AIP Conference Proceedings* (Vol. 1778, No. 1, p. 030047). AIP Publishing LLC.